

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara astronomis Kabupaten Sukabumi terletak antara $6^{\circ}57' - 7^{\circ}25'$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}49' - 107^{\circ}$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Sukabumi adalah berupa daratan seluas 4.145 km². Wilayah administrasi Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 kecamatan, 5 kelurahan, 381 desa. Saat ini ibukota Kabupaten Sukabumi berada di kecamatan Pelabuhanratu, meskipun beberapa kantor pemerintahan masih ada yang berdomisili di Kecamatan Cisaat, Kecamatan Cibadak bahkan di wilayah Kota Sukabumi.

Suatu daerah tentu memiliki sistem pemerintahan guna menjaga stabilitas daerah. Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BAB 1, pasal 1 ayat 6 menjelaskan Otonomi Daerah merupakan wewenang, hak dan kewajiban daerah dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang. Maka pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, dan pengoptimalan kinerja dalam mengelola keuangan daerah untuk membuktikan kemampuannya melaksanakan kewenangan yang merupakan hak daerah.

Kegiatan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam melaksanakan otonomi dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (PP No.12 Tahun 2019) Serta diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem keuangan pemerintah daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014). APBD secara langsung maupun tidak langsung

mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menetapkan tentang pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan. Agar pemerintah daerah tergolong ke dalam pemerintah yang akuntabilitas, serta efektivitas dan efisien suatu daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu poin penting yang harus dicapai.

Penilaian kinerja keuangan dikatakan poin penting karena kinerja keuangan digunakan untuk mengukur kondisi keuangan pada kegiatan masa lalu serta sebagai upaya umpan balik yang harus dilakukan dimasa mendatang. Kinerja keuangan di lihat menggunakan analisis data dengan rasio keuangan. Sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas dari setiap entitas dan potensi kinerja yang akan dilakukan. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya di bidang keuangan. Maka sudah seharusnya setiap pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangannya agar kinerja keuangannya dapat dinilai dengan baik. Namun meskipun demikian nyatanya tidak sedikit pemerintah daerah yang masih harus membenahi pengelolaan keuangannya.

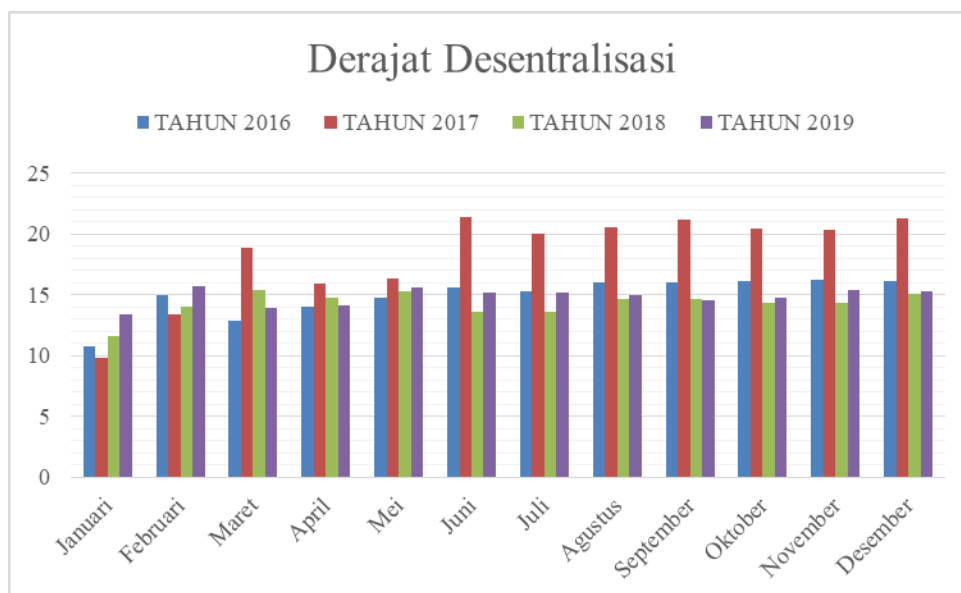
Berikut dibawah ini Pengukuran kinerja keuangan yang di hitung dalam penelitian menggunakan prespektif tiga rasio pengukuran kinerja yaitu Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, dan Rasio Kemandirian. Dapat dilihat Derajat Desentralisasi Pemerintah Daeah

Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2019 mengalami fluktuatif dalam kontribusi pendapatan asli daerah.

Tabel 1.1
Rasio Derajat Desentralisasi

BULAN	TAHUN			
	2016	2017	2018	2019
Januari	10,71	9,77	11,60	13,36
Februari	14,94	13,39	14,03	15,70
Maret	12,88	18,88	15,37	13,96
April	13,98	15,91	14,74	14,17
Mei	14,74	16,36	15,29	15,59
Juni	15,63	21,41	13,61	15,17
Juli	15,29	20,04	13,60	15,19
Agustus	16,06	20,49	14,61	14,98
September	16,06	21,22	14,62	14,53
Oktober	16,11	20,43	14,32	14,72
November	16,23	20,30	14,32	15,35
Desember	16,12	21,31	15,02	15,25

(Sumber : data diolah penulis, tahun 2020)



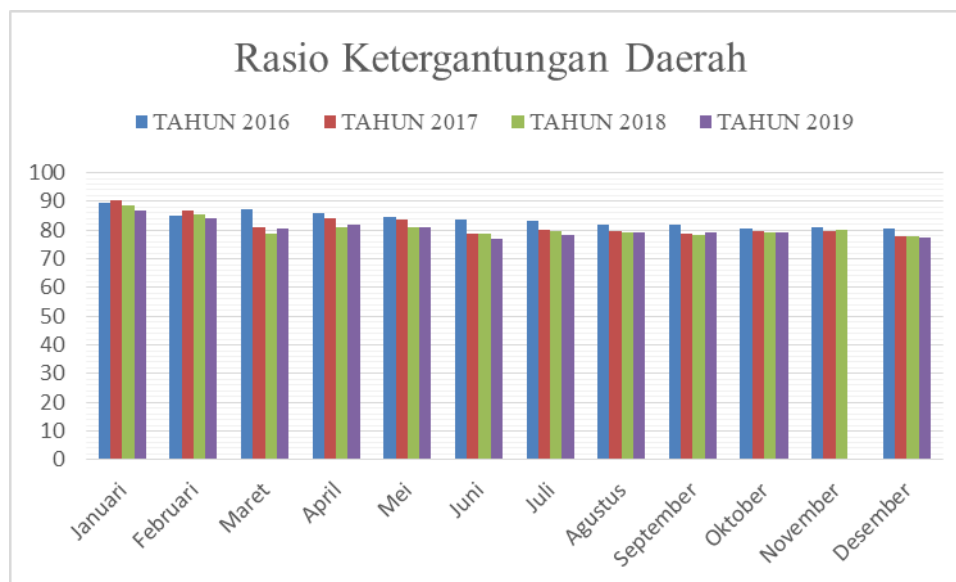
Gambar 1.2
Grafik Derajat Desentralisasi

Pengukuran kinerja selanjutnya yaitu Rasio Ketergantungan. Yang digunakan untuk melihat seberapa tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Berikut dibawah ini dapat di ketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2019 tingkat ketergantungannya cukup tinggi kepada pemerintah pusat, hal tersebut dilihat dari berdasarkan nilai presentase yang melebihi angka 50%. Ini menandakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi masih bergantung terhadap pemerintah pusat dan provinsi terutama dalam penggunaan anggaran dana perimbangan

Tabel 1.2
Rasio Ketergantungan

BULAN	TAHUN			
	2016	2017	2018	2019
Januari	89,28	90,22	88,39	86,63
Februari	85,05	86,60	85,52	84,29
Maret	87,11	81,11	78,60	80,63
April	86,01	84,08	80,81	81,95
Mei	84,43	83,588	81,12	81,02
Juni	83,64	78,54	78,75	77,17
Juli	83,42	79,92	79,77	78,23
Agustus	81,91	79,47	79,12	29,31
September	81,91	78,74	78,32	29,08
Oktober	80,76	79,54	79,39	79,22
November	80,90	79,56	79,88	79,03
Desember	80,50	77,74	77,86	77,23

(Sumber : data diolah penulis, tahun 2020)



Gambar 1.3

Grafik Rasio Ketergantungan

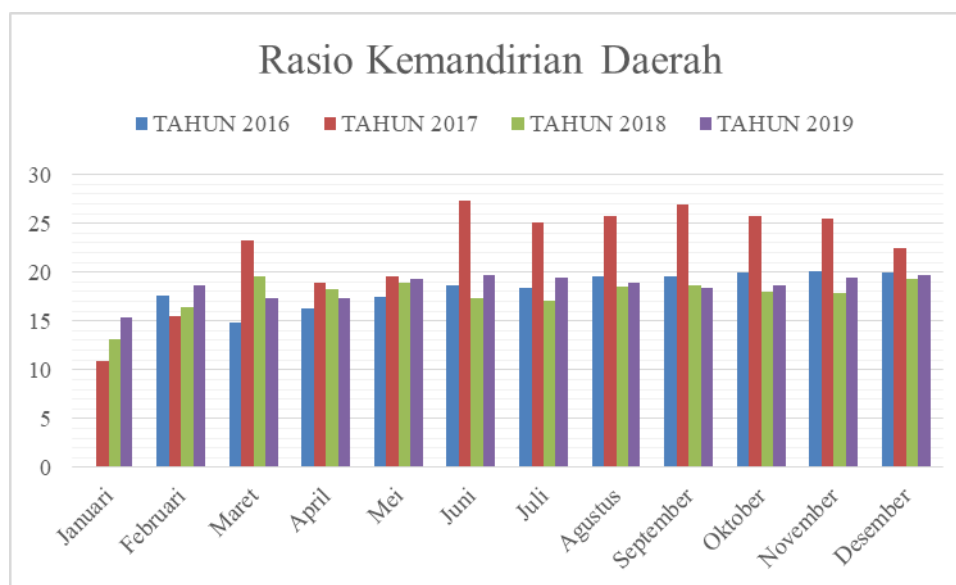
Pengukuran kinerja keuangan yang ketiga menggunakan Rasio Kemandirian yang digunakan untuk melihat seberapa tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam kemandirian keuangan daerah. Berikut di bawah ini dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016-2019 mengalami perkembangan yang fluktuatif di setiap bulannya. Dan dapat dikatakan bahwa kemampuan tingkat kemandirian daerah belum maksimal dikarenakan angka presentase hasil pengukuran dibawah 50%.

Tabel 1.3
Rasio Kemandirian

BULAN	TAHUN			
	2016	2017	2018	2019
Januari	11,99	10,83	13,12	15,42
Februari	17,57	15,47	16,41	18,63
Maret	14,78	23,28	19,56	17,31
April	16,25	18,92	18,24	17,29
Mei	17,46	19,57	18,85	19,24
Juni	18,69	27,26	17,28	19,66
Juli	18,32	25,07	17,04	19,41

Agustus	19,61	25,78	18,46	18,89
September	19,61	26,95	18,66	18,38
Oktober	19,95	25,68	18,04	18,59
November	20,06	25,52	17,92	19,43
Desember	20,02	22,42	19,29	19,74

(Sumber: data diolah penulis, tahun 2020)



Gambar 1.4
Grafik Rasio Kemandirian

Kasus pengelolaan keuangan yang terjadi dan dapat mengakibatkan kinerja keuangan yang tidak baik dikemukakan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Bahwa FITRA menemukan kesalahan berulang terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi pada tahun anggaran 2017. Selain itu FITRA menekankan dua indikator kesalahan besar Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, yaitu pertama bahwa Pemerintah Daerah belum profesional dalam pengelolaan keuangan. Kedua, Pemerintah Daerah sangat minim publikasi Laporan Kinerja Keuangan kepada Masyarakat. Hal tersebut dinilai mempengaruhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan, ditemukan (sukabumiupdate.com) :

1. Pemerintah Kabupaten Sukabumi dinilai tidak tertib dalam penatausahaan dan Pelaporan keuangan Persediaan. Terbukti pada 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 26 Kecamatan tidak menyampaikan laporan penatausahaan persediaan secara rutin.
2. Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak tertib dalam penatausahaan piutang Pajak Daerah non pajak Bumi dan Bangunan.
3. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah belum menatausahakan dana bergulir secara memadai.
4. Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak tertib dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan kesalahan penganggaran belanja pegawai.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemerintah pusat mengalokasikan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang merupakan salah satu penilaian kinerja keuangan pemerintah dilihat dari upaya pemerintah tersebut dalam penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Semakin sedikit dana perimbangan yang digunakan oleh pemerintah daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan dan semakin besar tingkat kemandirian daerah.

Kegiatan pemerintah daerah tidak hanya menghimpun dana dari pendapatan asli daerah atau suntikan dana dari pemerintah pusat. Penggunaan dana pemerintah daerah untuk menajalankan otonomi daerahnya disebut sebagai Belanja Daerah. Kegiatan belanja daerah juga turut berperan dalam menghasilkan sumber pendapatan daerah berupa asset yang bertambah demi peningkatan pelayanan. Salah satu belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah adalah

Belanja modal. Belanja Modal merupakan belanja pemerintah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Walaupun belanja modal dapat mempercepat perekonomian, pemerintah daerah tetap harus mengontrol dan menyesuaikan belanja daerahnya agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Penelitian mengenai Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan memang sudah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian yang dilakukan peneliti tidak sama dan memiliki perbedaan tertentu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tri Yuni Pratiwi	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DIPROVINSI JAWA TENGAH	Terdapat pengaruh positif dan signifikan PAD terhadap kinerja keuangan. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan. Terdapat pengaruh positif dan signifikan belanja modal terhadap kinerja keuangan.	1. Dana Perimbangan 2. Belanja Modal 3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 4. Menggunakan Metode Kuantitatif	1. Objek penelitian pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2. Meneliti PAD 3. Tahun Penelitian

		TAHUN ANGGARAN 2012-2016			
2	Juliani Dora	ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYA KARTA TAHUN 2010-2014	Hasil penelitian menyatakan bahwa secara umum kinerja pemerintah daerah kota Yogyakarta dinyatakan baik.	1.Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1.Lokasi Penelitian di Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2. Menggunakan Metode kualitatif 3. Tahun Penelitian
3	Ajeng Agysta Suseno	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012- 2016)	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Dana perimbangan berpengaruh negative terhadap Kinerja Keuangan. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah.	1.Dana Perimbangan 2.Belanja Modal 3.Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 4. Metode Kuantitatif	1. Meneliti PAD 2. Lokasi Penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 3.Tahun Penelitian

4	Diyah Ayuningsih	PENGARUH SIZE, WEALTH, LEVERAGE, BELANJA DAERAH, DAN INTERGOVERNMENTAL, REVENUE, TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH	Hasil penelitian menunjukkan sive, leverage, dan intergovernmental revenue tidak berpengaruh terdapat kinerja keuangan. Wealth dan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	1.Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 2.Metode Kuantitatif	1.Size, Wealth, Leverage,Belanja Daerah 2.Intergovernmental, Revenue 3. Tahun Penelitian
5	D.Kartika dan IC. Kusuma	ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO EFEKTIVITAS, DAN RASIO EFISIENSI PAD PADA LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SUKABUMI	Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian Kabupaten Sukabumi dari taun anggaran 2009-2013 rata-ata hanya sebesar 8,15%, yang tergolong sangat rendah dengan menunjukkan hubungan yang instruktif. Rasio efektivitas PAD kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 rata-rata	1.Lokasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	1. Analisis menggunakan metode kualitatif 2.Tahun Penelitian

			tingkat pencapaiannya sebesar 105,67% dari anggaran yang ditegakkan yang tergolong sangat efektif. Kinerja keuangan kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009- 2013 berdasarkan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien dengan rata- rata setiap tahunnya sebesar 5,02%.		
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan fenomena, kasus dan pemahaman yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa perbedaan yang dapat dilihat dengan jelas. Penelitian di lakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, populasi dan sampel yang akan diteliti terletak pada Laporan Realisasi Anggaran perbulan dengan tahun anggaran 2016-2019. Dimaksudkan untuk melihat seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dalam prespektif Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Daerah, dan Rasio Kemandirian Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Pemahaman dan daya tarik tersebut mengarahkan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**

SUKABUMI (Dalam Prespektif Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Daerah, dan Rasio Kemandirian Daerah).”

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Kontribusi pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukabumi belum maksimal.
2. Tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam pendapatan daerah belum maksimal.
3. Tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi terhadap pemerintah pusat sangat tinggi dalam penggunaan dana perimbangan.
4. Kualitas sumber daya manusia mengenai pemahaman dan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi belum professional.
5. Penggunaan anggaran Belanja Modal belum berbanding lurus dengan pembangunan infrastruktur.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi diharuskan melakukan pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah daerah untuk landasan evaluasi berkala serta perbaikan tahun ke tahun.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam prespektif Rasio Derajat Desentralisasi ?
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam prespektif Rasio Ketergantungan Daerah ?

3. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam prespektif Rasio Kemandirian Daerah ?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Prespektif Rasio Derajat Desentralisasi ?
5. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Prespektif Rasio Ketergantungan Daerah ?
6. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Prespektif Rasio Kemandirian Daerah ?
7. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam prespektif Rasio Derajat Desentralisasi ?
8. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam prespektif Rasio Ketergantungan Daerah ?
9. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam prespektif Rasio Kemandirian Daerah ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan Menjelaskan pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam prespektif Rasio Derajat Desentralisasi.

2. Mengetahui dan Menjelaskan pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam prespektif Rasio Ketergantungan Daerah.
3. Mengetahui dan Menjelaskan pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam prespektif Rasio Kemandirian Daerah
4. Mengetahui dan Menjelaskan pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Prespektif Rasio Derajat Desentralisasi
5. Mengetahui dan Menjelaskan pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Prespektif Rasio Ketergantungan Daerah
6. Mengetahui dan Menjelaskan pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Prespektif Rasio Kemandirian Daerah
7. Mengetahui dan Menjelaskan pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam prespektif Rasio Derajat Desentralisasi
8. Mengetahui dan Menjelaskan pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam prespektif Rasio Ketergantungan Daerah?

9. Mengetahui dan Menjelaskan pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam prespektif Rasio Kemandirian Daerah ?

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

1. Pengembangan Ilmu Akuntansi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk mengembangkan ilmu Akuntansi khususnya bidang Sektor Publik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang Kinerja Keuangan dan dapat mengembangkannya kedalam faktor lain.

3. Bagi Penulis

Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi khususnya bidang Akuntansi Sektor Publik yang berkenaan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Serta melatih kemampuan teknik analisis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan masukan maupun saran serta menjadi pertimbangan terutama dalam melihat pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara lebih teliti.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai alat pertimbangan, acuan dan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya